

Determinan Kemiskinan di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peran Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia

Retna Ningsih^{1*}, Hanna Hilyati Aulia², Dwi Retno Puspita Sari³

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Korespondensi: nretna153@gmail.com

Received: 30/09/2025

Revised: 26/11/2025

Accepted: 25/12/2025

Abstract

This study aims to analyze the influence of economic growth, minimum wage and the Human Development Index on the number of poor people in Lampung Province. Poverty is a multidimensional issue, not only related to low income but also encompassing aspects of education, health and access to economic resources. High poverty levels can hinder development, making it crucial to understand its determinants more deeply. This research uses a quantitative approach with an associative design and panel data regression analysis. The data used is secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) of Lampung Province for the period 2018-2024, covering 15 regencies/cities. Panel data regression combines cross-sectional and time series data, providing more accurate estimates. The technique involves several stages, including selecting the best model among the Common Effect Model, Fixed Effect Model and Random Effect Model through Chow test, Hausman test and Lagrange Multiplier test. The purpose of using panel regression is to determine the influence of independent variables both simultaneously and partially on the number of poor people, as well as to capture the dynamics of poverty changes based on regional and temporal differences. The research results show that, partially, the minimum wage has a significant influence on the number of poor people in Lampung Province. Conversely, economic growth and the Human Development Index do not statistically significant. However, all three variables simultaneously have a significant influence on poverty. These findings imply that increasing the minimum wage directly contributes to reducing poverty, while the influence of economic growth and Human Development Index is indirect or insignificant during the study period. From an Islamic economic perspective, poverty is not merely an economic phenomenon but a matter of social justice ('adl) and collective responsibility. The findings of this study can be interpreted within the framework of maqāṣid al-syarī'ah, particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), and wealth (ḥifẓ al-māl), highlighting the importance of fair wage policies and human development as instruments of poverty alleviation in Islamic economic policy.

Keywords: Economic Growth, Human Development Index, Minimum Wage, Number Of Poor People, Province Of Lampung



PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam akses kesehatan, pendidikan, serta kesempatan ekonomi. Secara global, laporan *Poverty and Shared Prosperity* menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi isu kompleks yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan perkembangan sektor sosial (World Bank, 2023).

Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun nonpangan untuk mencapai taraf hidup yang layak (Harlik dkk., 2013). Pendekatan ini sejalan dengan perspektif internasional, dimana kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan kemampuan manusia dalam mencapai kehidupan yang produktif (UNDP Human Development Report, 2023). Secara teori, kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori *Neo-Liberal* yang menekankan peran pasar dan tanggung jawab individu, serta teori Demokrasi Sosial menekankan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat (Pinontoan, 2020). Selain itu, penelitian global menunjukkan bahwa kemiskinan sangat terkait dengan ketimpangan dan akses pembangunan yang tidak merata (Adams, 2004).

Kemiskinan diklasifikasikan menjadi tiga jenis: (1) kemiskinan natural yang dialami sejak lahir; (2) kemiskinan kultural akibat pola hidup yang tidak produktif; dan (3) kemiskinan struktural yang disebabkan oleh ketimpangan sistem pembangunan. Dalam pengukuran kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan absolut berdasarkan kebutuhan kalori makanan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan nonpangan, serta pendekatan relatif berbasis melihat kesenjangan distribusi pendapatan (Sheyoputri, 2016).

Dalam perspektif ekonomi syariah, kemiskinan dipandang bukan sekadar persoalan kekurangan pendapatan, tetapi sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dan keseimbangan (*tawāzun*) (Chapra, 2000). Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai kewajiban kolektif masyarakat dan negara, sebagaimana tercermin dalam konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* (Chapra, 2008). Perlindungan terhadap kehidupan (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Ghazali, t.t.) menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi Islam, sehingga pengentasan kemiskinan merupakan bagian integral dari misi pembangunan berbasis nilai-nilai syariah (Auda, 2008).

Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Provinsi Lampung tercatat sekitar 9,05 juta jiwa, dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp470,4 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp51,4 juta. Namun, angka tersebut belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan, mengingat masih terdapat kelompok

masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tercermin dari 1.097,05 ribu jiwa atau 13,14% di tahun 2018 dan menurun menjadi 941,23 ribu jiwa atau 10,69% dari total penduduk pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih relatif tinggi dan menempatkan Lampung di posisi ke-15 dari 34 provinsi dalam hal kemiskinan nasional.

Beberapa kabupaten seperti Lampung Timur, Lampung Tengah dan Lampung Selatan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi, sedangkan daerah seperti Mesuji dan Kota Metro menunjukkan angka yang lebih rendah. Penurunan jumlah penduduk miskin ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Lampung. Namun, terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi nasional dan global, seperti pandemi *Covid-19* pada tahun 2020-2021 (BPS Provinsi Lampung, 2024). Situasi ini juga dilaporkan dalam laporan *Human Development Report*, bahwa pandemi menyebabkan tekanan besar terhadap indikator pembangunan manusia dan kemiskinan dunia (UNDP Human Development Report, 2023). Beberapa faktor yang secara teoritis berhubungan dengan kemiskinan antara lain pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan yang berperan dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Namun, berdasarkan teori *trickle-down effect* (dalam Renny dan Isrofiatul), manfaat pertumbuhan ekonomi belum tentu langsung dirasakan oleh kelompok miskin, sehingga pemerataan menjadi aspek penting (Puspitarini & Anggraini, 2018). Menurut Kuznets (dalam Todaro), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam menyediakan barang dan jasa melalui kemajuan teknologi dan kelembagaan (Kamaroellah, 2024). Sementara itu, Sukirno (dalam Mulyaningsih) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang menghasilkan lebih banyak barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mulyaningsih, 2019).

Data di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2024, dengan kontraksi signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*. Namun, tren positif mulai terlihat kembali sejak tahun 2021-2024. Rata-rata pertumbuhan berada di atas 4%, meskipun belum sepenuhnya mencapai tingkat sebelum pandemi. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Oleh karena itu, selain sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi perlu dianalisis secara komprehensif dalam hubungannya dengan faktor lain seperti upah minimum.

Dalam konteks ekonomi, upah merupakan balas jasa atas kontribusi tenaga kerja dalam proses produksi barang dan jasa. Upah minimum ditetapkan sebagai jaring pengaman untuk menjamin penghasilan layak bagi pekerja dan mendorong pemerataan pendapatan (Pratama & Aisyah, 2023).

Secara teoritis, konsep upah minimum dapat dijelaskan melalui pandangan ekonomi klasik, di mana upah ditentukan oleh mekanisme pasar dan berada pada tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja (Suhartini dkk., 2020). Penetapan upah minimum mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing daerah (Fajarwati, 2010).

Dalam ekonomi Islam, upah dipandang sebagai hak pekerja yang harus ditetapkan secara adil dan proporsional (Chapra, 1992). Prinsip keadilan distributif menekankan larangan eksploitasi tenaga kerja serta kewajiban memberikan imbalan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya (Zaman, 2015). Dengan demikian, kebijakan upah minimum dapat dipahami sebagai instrumen negara dalam menjaga keadilan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Data di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa upah minimum mengalami kenaikan dari Rp2,07 juta pada tahun 2018 menjadi Rp2,71 juta pada tahun 2024, meskipun sempat stagnan pada tahun 2021 akibat pandemi *Covid-19*. Kota Bandar Lampung konsisten mencatat tingkat upah minimum tertinggi, yaitu mencapai Rp3,10 juta pada tahun 2024, sedangkan kabupaten lain seperti Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus memiliki tingkat upah minimum yang lebih rendah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakteristik ekonomi daerah, kapasitas industri dan produktivitas tenaga kerja di masing-masing wilayah. Namun, tantangan masih muncul karena upah minimum pada beberapa daerah masih belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak, sehingga dapat memengaruhi kesejahteraan pekerja dan dinamika ketenagakerjaan di daerah Lampung.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* (Anto, 2009). Dimensi kesehatan sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dimensi pendidikan berkaitan dengan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), sedangkan standar hidup layak mencerminkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, peningkatan IPM dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan holistik (*falāḥ*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia, yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar layak hidup. Teori *Human Capital* yang dikembangkan oleh Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. IPM yang tinggi mencerminkan akses penduduk terhadap layanan dasar yang baik, sehingga berperan dalam pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, IPM yang rendah berkorelasi dengan rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat (Efendi dkk., 2024).

Data Provinsi Lampung menunjukkan bahwa meskipun tren IPM mengalami peningkatan selama periode 2018-2024, dari 69,02 menjadi 71,81, angka tersebut masih tergolong sedang dan tertinggal dibandingkan beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan secara bertahap dalam kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Kota Bandar Lampung dan Kota Metro secara konsisten menempati peringkat tertinggi IPM, dengan nilai yang berada di atas 78,00 pada tahun 2024. Sedangkan, Kabupaten seperti Mesuji dan Pesisir Barat memiliki nilai IPM yang lebih rendah, meskipun tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan peningkatan investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi agar kualitas hidup masyarakat terus membaik dan mendorong penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menurunkan kemiskinan melalui peningkatan aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja. Upah minimum juga diprediksi berdampak pada pengurangan kemiskinan karena peningkatan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah. Sementara itu, IPM mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup, yang secara konseptual berhubungan erat dengan kemiskinan di suatu daerah. Ketiga variabel tersebut diharapkan mampu menekan angka kemiskinan. Namun, berbagai temuan empiris menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan teori tersebut.

Studi oleh Ghazy Faden dkk. di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa hanya upah minimum yang berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak berpengaruh langsung (Faadihilah, 2023). Sebaliknya, penelitian oleh Labiq Ahwazy Ahmad di Pulau Madura menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan ekonomi yang berdampak negatif terhadap kemiskinan, sementara upah minimum dan IPM tidak menunjukkan pengaruh signifikan (Ahmad, 2025). Perbedaan hasil ini menandakan bahwa efektivitas ketiga variabel tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, struktur ekonomi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya *research gap* yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait perbedaan pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di berbagai daerah. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara spesifik menguji ketiga variabel tersebut secara simultan dalam konteks Provinsi Lampung menggunakan pendekatan data panel lintas kabupaten/kota dalam rentang waktu terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan tujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah

minimum dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin menggunakan data panel 15 kabupaten/kota periode 2018-2024. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran yang lebih komprehensif berdasarkan variasi lintas wilayah dan waktu, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai faktor-faktor penentu kemiskinan di Provinsi Lampung berdasarkan konteks regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung. Data yang digunakan berupa data sekunder berbentuk panel, yaitu gabungan data *time series* dari tahun 2018-2024 dan data *cross section* dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Sumber data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap data statistik yang relevan terkait variabel penelitian.

Analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak *Eviews 12*. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui tiga tahapan pengujian, yaitu: (1) Uji *Chow* untuk menentukan pemilihan antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), (2) Uji *Hausman* untuk memilih *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM), serta (3) Uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk menguji kelayakan penggunaan *Random Effect Model* (REM). Selain itu, untuk memastikan validitas dan reliabilitas model regresi, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji *heteroskedastisitas*, uji *multikolinieritas* dan uji autokorelasi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk menguji pengaruh simultan, uji t untuk menguji pengaruh parsial dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin (ribu jiwa), sedangkan variabel independen adalah pertumbuhan ekonomi (persen), upah minimum (rupiah) dan indeks pembangunan manusia (satuan indeks).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Data

a. Pemilihan model estimasi data panel

1) Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk menentukan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *Common Effect Model* (CEM) dan H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM). H_0 akan ditolak dan H_1 diterima apabila nilai probabilitas *Cross Section F* < 0,05. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, nilai probabilitas *Cross-Section F* sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Dengan demikian, model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2) Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang paling tepat digunakan. Hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *Random Effect Model* (REM) dan H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM). H_0 akan ditolak dan H_1 diterima apabila nilai probabilitas *Cross-section Random* $< 0,05$. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai *Cross-section random* adalah 0,3678, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, *Random Effect Model* merupakan metode estimasi yang lebih sesuai untuk digunakan.

3) Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih apakah *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* yang paling tepat digunakan. Hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *Common Effect Model* (CEM) dan H_1 : *Random Effect Model* (REM). H_0 akan ditolak dan H_1 diterima apabila nilai probabilitas *Breusch-Pagan* $< 0,05$. Adapun hasil dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh bahwa nilai probabilitas *Breusch-Pagan* adalah 0,0000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, *Random Effect Model* merupakan metode estimasi yang lebih tepat digunakan.

Berdasarkan hasil dari pengujian *Chow*, *Hausman* Dan *Lagrange Multiplier* yang telah dilakukan, dapat diartikan bahwa model estimasi yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

b. Pengujian asumsi dan kesesuaian model

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan melakukan transformasi ke logaritma. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Jarque-Bera* adalah 5,365701 dengan probabilitas 0,068368 $> 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian terlihat bahwa tidak ada nilai koefisien korelasi antar variabel independen $< 0,8$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk miskin memiliki nilai probabilitas $> 0,05$. Dengan demikian, model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai *Durbin-Watson* (DW) sebagai indikator utama dalam mendeteksi adanya autokorelasi. Dengan ketentuan: Jika nilai *Durbin-Watson* terletak antara d_u sampai $(4-d_u)$, maka tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil dari uji autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan nilai *Durbin-Watson* (DW), diperoleh bahwa nilai *Durbin-Watson* pada *output* dengan model *Random Effect* sebesar 2,1341. Adapun nilai *Durbin-Watson* pada tabel untuk $K=5$ dan $N=105$ adalah sebesar 1,7617, sedangkan nilai $(4-d_u)$ adalah 2,2383. Karena nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh 2,1341 berada di antara batas bawah ($d_u=1,7617$) dan $(4-d_u=2,2383)$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah autokorelasi.

c. Pengujian hipotesis

1) Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model umum yang dinyatakan dalam bentuk persamaan koefisien, sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta^1 X^{1it} + \beta^2 X^{2it} + \beta^3 X^{3it} + e^{it}$$

Keterangan:

- \hat{Y} = Jumlah Penduduk Miskin
- α = Konstanta
- $\beta_{(1,2,3)}$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- X_1 = Pertumbuhan Ekonomi
- X_2 = Upah Minimum
- X_3 = Indeks Pembangunan Manusia
- e = *Error term*
- t = *Time series*
- i = *Cross section*

Hasil pengelolaan data melalui *Eviews 12*, dengan *Random Effect Model* diperoleh hasil dalam bentuk persamaan koefisien regresi, sebagai berikut:

$$Y = 183,8336 - 0,3692 X_1 - 9,84 \times 10^{-6} X_2 - 1,2651 X_3 + e$$

Dari model di atas dibuat interpretasi:

- a) Konstanta sebesar 183,8336 menunjukkan bahwa jika variabel pertumbuhan ekonomi (X_1), upah minimum (X_2) dan indeks

pembangunan manusia (X_3) bernilai 0 maka nilai variabel jumlah penduduk miskin (Y) adalah sebesar 183,8336.

- b) Nilai koefisien regresi Pertumbuhan Manusia (X_1) sebesar -0,3692 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pertumbuhan ekonomi, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin (Y) sebesar 0,3692.
- c) Nilai koefisien regresi Upah Minimum (X_2) sebesar $-9,84 \times 10^{-6}$ berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam upah minimum, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin (Y) sebesar 0,00000984.
- d) Nilai koefisien regresi Indeks Pembangunan Manusia (X_3) sebesar -1,2651 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan indeks pembangunan manusia, maka jumlah penduduk miskin (Y) mengalami penurunan sebesar 1,2651.

2) Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan ketentuan: jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ pada tingkat signifikan 0,05, maka H_0 ditolak, dan begitupun sebaliknya. Hasil uji t menunjukkan bahwa:

- (a) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin, dengan hipotesis :

H_{01} : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung.

H_1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil uji t pada variabel pertumbuhan ekonomi memiliki probabilitas $0,0575 > 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) tidak memiliki pengaruh (tidak signifikan) terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya H_{01} diterima dan H_1 ditolak.

- (b) Pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin, dengan hipotesis:

H_{02} : Upah minimum tidak berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung.

H_2 : Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil uji t pada variabel upah minimum memiliki probabilitas $0,0355 < 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel upah minimum (X_2) memiliki pengaruh (signifikan) terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya H_{02} ditolak dan H_2 diterima.

- (c) Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin, dengan hipotesis:

H_{03} : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung.

H_3 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung.

Hasil uji t pada variabel indeks pembangunan manusia memiliki probabilitas $0,2176 > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (X_3) tidak memiliki pengaruh (tidak signifikan) terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya H_{03} diterima dan H_3 ditolak.

Dengan demikian, hanya upah minimum yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung.

3) Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan ketentuan: Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima (H_1 ditolak) dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak (H_1 diterima). Adapun cara penentuan besaran nilai F_{tabel} adalah jumlah variabel ($k=4$) dan jumlah data ($n=105$), maka df adalah $df_1 = k - 1 = 3$ dan $df_2 = n - k = 101$. Berdasarkan distribusi F pada $\alpha = 5\%$, diperoleh F_{tabel} sebesar 2,69. Dengan hipotesis:

H_{04} : Pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia secara simultan tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Lampung.

H_4 : Pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Lampung.

Hasil yang diperoleh dari uji F_{hitung} yaitu 36,70416. Sementara F_{tabel} dengan tingkat $\alpha = 5\%$ adalah 2,69. Dengan demikian, $F_{hitung} > F_{tabel}$ adalah $36,70416 > 2,69$. Kemudian nilai probabilitas yaitu sebesar $0,000000 < 0,05$, sehingga H_{04} ditolak dan H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

4) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil yang diperoleh adalah nilai *Adjusted R-Squared*

(R²) adalah 0,507372. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel-variabel dependen adalah sebesar 50,73%. Atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 50,73% terhadap variabel dependennya. Sisanya 49,27% lainnya dipengaruhi faktor lain di luar model regresi tersebut.

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada periode 2018-2024. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan di Lampung bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, kebijakan ketenagakerjaan, serta kualitas sumber daya manusia.

a. Pengaruh Parsial Pertumbuhan Ekonomi

Secara parsial, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, tetapi tidak signifikan secara statistik. Hal ini menandakan bahwa meskipun terjadi peningkatan PDRB, manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok miskin. Fenomena ini dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi pendapatan, dominasi sektor non-padat karya, serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap modal dan sumber daya produksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Hukom, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak signifikan menurunkan kemiskinan apabila hasil pembangunan tidak merata (Hidayat & Hukom, 2023). Pandangan ini sejalan dengan teori Todaro dan Smith, yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata agar mampu menurunkan kemiskinan (Todaro & Smith, 2020)..

Dalam perspektif ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan output, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Islam menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Chapra, 2000). Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tarwāzun*), serta berpotensi memperbesar kesenjangan sosial yang justru memperparah kemiskinan.

b. Pengaruh Parsial Upah Minimum

Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, meskipun kontribusinya relatif kecil. Kenaikan upah minimum terbukti menurunkan kemiskinan, terutama bagi sektor formal.

Namun, efektivitasnya terbatas karena tingginya jumlah pekerja di sektor informal yang tidak terjangkau aturan upah minimum serta adanya inflasi yang mengurangi daya beli riil (Utami & Rofiuddin, 2022). Fenomena di Lampung menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki upah minimum tertinggi, namun kabupaten lain seperti Pesawaran dan Tanggamus masih di bawah standar kebutuhan hidup layak. Temuan ini sesuai dengan penelitian Erliza Putri dan Dewi Putri, yang menyatakan bahwa kebijakan upah minimum perlu didukung penciptaan lapangan kerja formal dan pengendalian harga agar dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan optimal (Putri & Putri, 2021).

Relevansi kebijakan upah minimum ini juga tercermin dalam perspektif internasional. Bank Dunia menekankan bahwa kebijakan pengupahan yang efektif di berbagai negara selalu disertai dengan stabilitas harga serta ekspansi kesempatan kerja formal. Kombinasi ketiga faktor: upah minimum yang layak, inflasi yang terkendali dan pasar kerja formal yang kuat, menjadi kunci agar kebijakan upah benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara berkelanjutan (World, 2023).

Dalam perspektif ekonomi syariah, upah dipandang sebagai hak fundamental pekerja yang harus ditetapkan secara adil dan proporsional. Islam melarang praktik eksploitasi tenaga kerja dan menekankan kewajiban pemberi kerja untuk memberikan upah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya (Chapra, 1992). Prinsip keadilan distributif dalam Islam menggarisbawahi bahwa kebijakan upah minimum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi kelompok rentan (Zaman, 2015). Oleh karena itu, kebijakan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan.

c. Pengaruh Parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, tetapi secara statistik tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia belum memberikan dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, karena masih terdapat ketimpangan akses layanan dasar, distribusi aset dan keterbatasan peluang ekonomi. Meskipun demikian, IPM tetap merupakan faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan, terutama melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan standar hidup (Sayifullah & Gandasari, 2016). Fenomena khusus di Lampung menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung dan Kota Metro memiliki IPM tinggi dan jumlah penduduk miskin rendah, sedangkan kabupaten lainnya seperti Mesuji dan Pesisir Barat menunjukkan sebaliknya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rusdi (Rusdi, 2023) dan Sipahutar Nasution (Sipahutar & Nasution, 2023), yang

menyatakan bahwa IPM berperan secara praktis meskipun tidak signifikan secara statistik.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), pembangunan manusia bersifat akumulatif dan berdampak jangka panjang. Karena itu, meskipun temuan di Lampung menunjukkan bahwa IPM belum memberikan efek langsung yang kuat, pengaruh simultannya tetap signifikan dalam model keseluruhan. Hal ini menguatkan pandangan global bahwa peningkatan kualitas manusia membutuhkan waktu sebelum tercermin dalam pengurangan kemiskinan secara nyata (UNDP Human Development Report, 2023).

Dalam perspektif ekonomi syariah, IPM memiliki kesesuaian yang kuat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Dimensi kesehatan sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), pendidikan berkaitan dengan perlindungan akal (*ḥifz al-'aql*), dan standar hidup layak mencerminkan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) (Anto, 2009). Dengan demikian, peningkatan IPM tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan holistik (*falāḥ*). Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan manusia menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

d. Pengaruh Simultan Ketiga Variabel

Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung. Model empiris menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi kemiskinan antar kabupaten/kota pada periode penelitian. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan oleh satu aspek tunggal saja, tetapi harus melihat berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan dan standar hidup (Alkire & Foster, 2011).

IPM muncul sebagai variabel dengan kontribusi paling dominan, mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh strategis dalam menekan kemiskinan. Temuan ini konsisten dengan Rains, Stewart & Samman, yang menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan motor utama pengurangan kemiskinan jangka panjang karena memperluas kapabilitas ekonomi masyarakat (Ranis dkk., 2006). Sejalan dengan hasil penelitian Rusdi (Rusdi, 2023) serta Sipahuntar & Nasution (Sipahutar & Nasution, 2023), yang menyatakan bahwa meskipun IPM tidak selalu signifikan secara parsial, tetapi secara simultan IPM tetap berkontribusi besar dalam menjelaskan variasi kemiskinan karena mencakup dimensi fundamental seperti pendidikan, kesehatan dan standar hidup.

Sementara itu, upah minimum terbukti signifikan secara statistik

dalam model simultan, meskipun kontribusinya relatif kecil. Hal ini sejalan dengan temuan Erliza Putri dan Dewi Putri (Putri & Putri, 2021) serta Ghazy Faden dkk. (Faadihilah, 2023), yang menyatakan bahwa kebijakan upah minimum berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan, terutama ketika diiringi oleh perluasan kesempatan kerja di sektor formal. Hasil ini juga konsisten dengan studi internasional Fields, yang menyatakan bahwa upah minimum dapat menurunkan kemiskinan ketika berhasil meningkatkan pendapatan pekerja sektor formal, tetapi dampaknya akan terbatas apabila proporsi pekerja informal besar, seperti kondisi yang terjadi di banyak daerah di Indonesia termasuk Lampung (Fields & Kanbur, 2007).

Sedangkan, pertumbuhan ekonomi meskipun tidak signifikan secara parsial dalam penelitian ini, tetap memberikan kontribusi melalui arah hubungan negatif terhadap kemiskinan dalam model simultan. Temuan ini konsisten dengan Ravallion (Ferreira & Ravallion, 2008) dan Hidayat & Hukom (Hidayat & Hukom, 2023), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menekan kemiskinan hanya jika bersifat inklusif dan merata. Dalam konteks simultan, variabel pertumbuhan ekonomi tetap bekerja bersama IPM dan upah minimum dalam mempengaruhi kemiskinan.

Secara keseluruhan, hasil simultan penelitian ini selaras dengan Ali Mauludi dkk. (Mauludi dkk., 2023) dan Ghazy Faden dkk. (Faadihilah, 2023), yang menegaskan bahwa kombinasi variabel sosial dan ekonomi secara bersama-sama lebih mampu menjelaskan dinamika kemiskinan dibandingkan jika dianalisis secara parsial. Penelitian ini juga konsisten dengan temuan internasional bahwa pendekatan multidimensional lebih efektif dalam memahami dinamika kemiskinan (World, 2023). Dengan demikian, validasi empiris ini memperkuat bahwa pengurangan kemiskinan di Provinsi Lampung memerlukan kebijakan terpadu antara penguatan kualitas manusia, kebijakan pengupahan yang efektif serta pertumbuhan ekonomi yang merata serta inklusif.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan (falāḥ). Oleh karena itu, kebijakan ekonomi di Provinsi Lampung perlu diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan maqāṣid al-syarī'ah melalui pembangunan manusia dan distribusi pendapatan yang adil.

KESIMPULAN

Hasil dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian dengan judul *Determinan Kemiskinan di Provinsi Lampung: Peran Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia*, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin, sehingga peningkatan pertumbuhan belum secara langsung menurunkan kemiskinan. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan, meskipun kontribusinya relatif kecil terhadap penurunan kemiskinan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi variabel yang memiliki kontribusi paling besar dalam menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin, namun pengaruhnya tidak signifikan secara signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 50,73%, yang berarti setengah dari variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan IPM dalam model.

Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung tidak dapat bertumpu pada satu faktor tunggal, melainkan memerlukan pendekatan multidimensional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak tetap menjadi faktor paling dominan dalam menekan kemiskinan. Kebijakan upah minimum terbukti membantu mengurangi kemiskinan, tetapi efektivitasnya memerlukan dukungan penciptaan lapangan kerja formal dan penguatan sektor informal. Pertumbuhan ekonomi juga perlu diarahkan agar lebih inklusif sehingga kelompok masyarakat berpendapatan rendah dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi kebijakan dalam perspektif ekonomi syariah menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial. Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan upah minimum mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pekerja sesuai prinsip keadilan distributif Islam. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus dipandang sebagai bagian dari upaya mencapai *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan sekadar indikator statistik. Kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu disinergikan dengan instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan pemberdayaan ekonomi umat untuk memperkuat dampak pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama proses penelitian, serta penyusunan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung atas data yang tersedia dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Dukungan dari institusi pendidikan tempat penulis bernaung juga sangat membantu dalam menyediakan fasilitas penelitian. Segala bentuk bantuan yang diberikan tidak dapat disebutkan satu per satu, namun penulis menyampaikan apresiasi yang

sebesar-besarnya atas kontribusi seluruh pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

KONTRIBUSI PENULIS

Artikel yang berjudul “Determinan Kemiskinan di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peran Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia” disusun oleh RN, yang berkontribusi dalam perumusan konsep penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan naskah. HH dan DR berperan memberikan arahan, masukan substansial, supervisi akademik, serta bimbingan dalam proses penyempurnaan naskah hingga siap untuk publikasi.

REFERENSI

- Adams, R. H. (2004). Economic Growth, Inequality and Poverty. *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Ahmad, L. A. (2025). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Pulau Madura Tahun 2012-2023*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Al-Ghazali, A. H. (t.t.). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95, 476–487.
- Anto, M. H. (2009). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, 16(1), 69–95.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- BPS Provinsi Lampung. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan IV-2024. *Berita Resmi Statistik*, No. 13/02/18/Th. XXV, 2(5).
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Efendi, B., Nasution, D. P., Rusiadi, & Pratiwi, D. (2024). *Teori Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi* (M. Jannah, Ed.; 1 ed.). CV. Tahta Media Group.
- Faadihilah, G. F. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(5), 1794–1801.
- Fajarwati, D. (2010). Kajian Akademis Dalam Pertimbangan Penyusunan Upah. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33558/jrak.v1i1.122>
- Ferreira, F. H. G., & Ravallion, M. (2008). Global Poverty and Inequality: A Review of the Evidence. *The World Bank Development Research Group*, May.
- Fields, G. S., & Kanbur, R. (2007). Minimum wages and poverty with income-sharing. *ILR Review*.

- Harlik, Amir, A., & Hardiani. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 109–120. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1500>
- Hidayat, A., & Hukom, A. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Pengangguran di Kalimantan Tengah pada Tahun 2010-2019. *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1(2), 11–20.
- Kamaroellah, A. (2024). *Ekonomi pembangunan (Teori dan Aplikasi)* (S. R. Wahyuningrum, Ed.; 1 ed.). UIN Madura Press.
- Mauludi, A., Fadllan, & Rahmawati, F. N. (2023). Pengaruh Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 68–88. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i1.8945>
- Mulyaningsih. (2019). *Pembangunan Ekonomi* (N. Kania, Ed.). CV. Kimfa Mandiri.
- Pinontoan, M. (2020). *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis dan Holistik)* (Moh. Nasrudin, Ed.; 1 ed.). PT Nasya Expanding Management.
- Pratama, F. F., & Aisyah, S. (2023). Pengaruh IPM, Jumlah Penduduk Dan Upah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Bali Tahun 2018-2021. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(1), 1–10. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10174>
- Puspitarini, R. C., & Anggraini, I. (2018). Trickle-Down Economics Arthur Lewis dan Ekonomi Pembangunan Wisata Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2017-2018. *Nation State: Journal of Internstional*, 1(1), 220–232.
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum , Tingkat Pengangguran Terbuka , Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 106–114.
- Ranis, G., Stewart, F., & Samman, E. (2006). Human Development: Beyond the Human Development Index. *Journal of Human Development*, 7(3), 323–351. <https://doi.org/10.1080/14649880600815917>
- Rusdi, M. (2023). Pengaruh Index Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 971–981.
- Sayifullah, & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, 6(2), 115–273. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Sheyoputri, A. Ch. A. (2016). *Mengenal Dan Memahami Kemiskinan* (1 ed., Nomor 1). CMB Press.
- Sipahutar, S. R., & Nasution, A. M. (2023). Pengaruh IPM, PDRB Perkapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara. *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 643–660.
- Suhartini, E., Yumarni, A., Maryam, S., & Mulyadi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah* (P. Vita, Ed.; 1 ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Thirteenth Edition. Dalam *Pearson Education Limited* (13 ed.).
- UNDP Human Development Report. (2023). United Nations Development Programme (UNDP). *UNDP*.

- Utami, I. T., & Rofiuddin, M. (2022). Analisis pengaruh upah minimum , belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(3), 145–160.
- World Bank. (2023). *Poverty and Shared Prosperity Report*. World Bank Group.
- World, W. B. (2023). Poverty and Shared Prosperity Report. *World Bank Group*.
- Zaman, A. (2015). Islamic Economics: A Survey of the Literature. *Islamic Studies*, 49(1), 37–63.